



**RENCANA AKSI KINERJA  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018**

**NOMOR : RAK-255/PW14/6/2018**  
**TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018**

## KATA PENGANTAR

BPKP dalam menjalankan fungsinya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional melakukan kegiatan pengawasan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Hal ini sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.


Dalam rangka melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan empat fokus pengawasan, yaitu Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah dan Peningkatan *Governance System*.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan empat fokus tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun menyusun Perjanjian Kinerja, PKPT dan Alokasi Anggaran Belanja dalam RKA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Perwakilan adalah memadukan ketiga dokumen tersebut dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang memuat sasaran program/kegiatan beserta indikator kinerja, tolak ukur dan anggaran untuk mencapai rencana program/kegiatan yang telah disusun tersebut.

Diharapkan dengan disusunnya Rencana Aksi Kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat memiliki pedoman atau alat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, serta memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, terutama Kepala BPKP mengenai kinerja yang ingin diwujudkan secara jelas dan terukur, sebagaimana termuat dalam Renstra BPKP

Tahun 2015-2019. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah efektif dan efisien serta terkait langsung dengan upaya pencapaian sasaran program/kegiatan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 19 Februari 2018  
Kepala Perwakilan,  
  
Arman Sabri Harahap  
NIP. 19670110 199303 1 001



RENCANA AKSI ATAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Triwulan				Sub Output/Komponen	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Target Pelaksanaan Kegiatan			
		Satuan	I	II	III	IV					I	II	III	IV
<b>A. Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>													
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	60%	0	14	30,33	60	LHP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	101 Laporan	2.566.800.718	0	13	13	13
	1.2 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	100%	0	0	0	100	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik	2 Laporan	4.200.000	0	1	0	1
	1.4 Persentase BUMD yang kerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	43,75%	0	0	20	43,75	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	BUMD yang kerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang	18 Laporan	165.249.680	5	12	1	0
	1.5 Presentase BLUD yang kerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	50%	0	0	0	50	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	BLUD yang kerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	4 Laporan	30.460.000	2	0	2	0
2. Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	50%	10	20	35	50	Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	11 Laporan	51.650.000	2	2	4	3
	2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	72%	20	40	60	72	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di APH	7 Laporan	204.748.016	2	1	2	0
	2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	65%	15	30	45	65	Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian	Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan	4 Laporan	37.783.300	0	2	2	0
	2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	75%	30	75	75	75	Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	1 Laporan	8.360.000	0	1	0	0
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	75%	0	75	75	75	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Berbasis Kasus	Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	1 Laporan	7.800.000	0	0	1	0
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam	4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	52%	0	25	52	52	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud	2 Laporan	13.360.000		1		1
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	65%	0	30	65	65	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud melalui Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)	K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	2 Laporan	33.414.286	0	1	1	0
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100%	100	100	100	100	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan	21 Laporan	389.676.000	0	1	0	20
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	57,14%	0	0	28,57	57,14								
	6.4 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	42,86%	42,86	42,86	42,86	42,86								
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100%	0	0	100	100	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan	30 Laporan	499.320.000	5	11	13	1
	7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	85,71%	0	21,43	85,71	85,71								
	7.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	14,29%	0	14,29	14,29	14,29								
<b>B Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>													
1. Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	52 Laporan	7	14	20	11	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan	52 Laporan	1.551.729.000	7	14	20	11
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	18 Laporan	11	1	4	2	Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan	18 Laporan	813.204.000	11	1	4	2
3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di seluruh Perwakilan	3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	3 Laporan	3	0	0	0	Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di seluruh Perwakilan	3 Laporan	85.230.000	3	0	0	0

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Triwulan				Sub Output/Komponen	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Target Pelaksanaan Kegiatan			
		Satuan	I	II	III	IV					I	II	III	IV
4. Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	80 Laporan	13	22	32	13	LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	80 Laporan	673.663.000	13	22	32	13
6. Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan	6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	21 Laporan	0	1	0	20	Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan	21 Laporan	389.676.000	0	1	0	20
7. Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan	7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	30 Laporan	5	11	13	1	Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan	30 Laporan	499.320.000	5	11	13	1
<b>A Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>													
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP	1.1 Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP (sk	Skala 8	-	-	-	8	Layanan Perkantoran	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP	12 layanan	17.788.599.000	3	3	3	3
<b>B Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>													
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	38 Laporan	9	10	9	10	051. Penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan 052. Pengelolaan kepegawaian 053. Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan	Tersedianya rencana, pemantauan dan pelaporan Pengelolaan kepegawaian Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan	5 Dokumen 8 Laporan 25 Laporan	87.080.000 450.000 672.333.000	4 2 6	0 2 6	1 2 6	0 2 7
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal	2.1 Tersedianya sarana prasarana BPKP	1 Unit	1	0	0	0	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Tersedianya sarana prasarana BPKP	1 Unit	197.000.000	1 Unit			

